

Determinant Pembiayaan di Sektor Pertanian pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 di Indonesia

Roby Maulana¹ dan Deni Lubis²

¹Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB

²Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyelamat ekonomi Indonesia dengan kontribusi positif terhadap PDB selama Pandemi Covid-19. Namun, proporsi pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah di Indonesia selama Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode VAR/VECM. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah Januari 2020 hingga Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan pertanian, sedangkan variabel NPF, Inflasi, dan PUAS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pertanian. Dalam rangka meningkatkan pembiayaan dan produktifitas di sektor pertanian, pemerintah diharapkan memberi insentif kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan di sektor pertanian.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan, Pertanian, Variabel makro

PENDAHULUAN

Latar Belakang

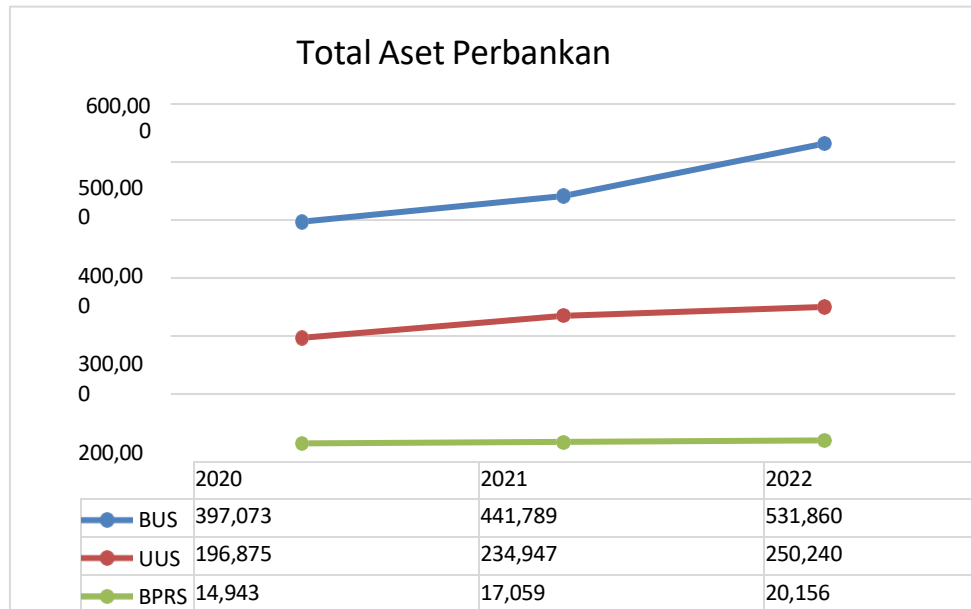
Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Mengingat Negara Indonesia adalah negara agraris yang menggantungkan sebagian besar perekonomian pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Peranan sektor pertanian adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan, penyedia pangan, penghasil devisa negara dan mengurangi kemiskinan di pedesaan serta pembangunan pertanian dapat mengurangi impor dan mendorong ekspor. Sehingga dengan perannya tersebut membuat sektor pertanian sebagai penyelamat perekonomian saat dalam kondisi krisis seperti Pandemi Covid-19. Selain itu, sektor pertanian juga disebut sebagai motor penggerak pembangunan nasional karena dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Menurut Haryanto (2009), Peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui jumlah tenaga kerja yang diserap dan jumlah

kontribusi sektor ekonomi tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB selama pandemi Covid-19 cenderung positif dan menjadi penyumbang terbesar ketiga PDB Nasional setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Besarnya peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional membuat sektor ini menjadi salah satu sektor yang penting untuk diperhatikan dan difasilitasi untuk pengembangan dan keberlanjutannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala terutama kendala akses terhadap sumber-sumber permodalan. Adapun penyebab utama permasalahan tersebut karena adanya anggapan bahwa sektor pertanian merupakan sektor usaha yang memiliki risiko sangat tinggi dibandingkan dengan sektor usaha yang lainnya (Thoha dan Saptia 2009). Ditambah dengan risiko yang muncul karena adanya pandemi Covid-19 seperti pinjaman yang tidak dilunaskan oleh pihak yang meminjam kredit sehingga pihak bank menjadi berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai kondisi sektor pertanian tersebut maka dibutuhkan sumber alternatif permodalan yang tepat sesuai dengan karakteristik usaha di sektor ini. Salah satu solusinya yaitu melakukan kerja sama dengan pihak perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini berorientasi pada sektor riil dan tahan terhadap krisis seperti Pandemi Covid-19. Bahkan, perbankan syariah mampu tumbuh positif selama Pandemi Covid-19 yang dapat dilihat dari perkembangan aset perbankan syariah pada Gambar 1.



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Diolah
Gambar 1 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Adanya pembiayaan sektor pertanian oleh perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan permodalan yang dihadapi petani, sehingga taraf hidup petani menjadi meningkat dan distribusi pembiayaan pada sektor pertanian pun akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan oleh perbankan syariah untuk sektor pertanian di Indonesia dalam memberikan akses permodalan kepada usaha sektor pertanian.

Sektor pertanian berpengaruh sangat besar dalam perkembangan ekonomi negara Indonesia. Dikutip dari BPS (2023) pada tahun 2022 bahwa sektor pertanian telah menyerap tenaga kerja sekitar 38,70 juta penduduk Indonesia, yang mewakili hampir 30% dari total angkatan kerja di Indonesia. Namun demikian, dengan jumlah tenaga kerja yang besar tersebut, ternyata sektor pertanian sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) pada tahun 2023

hanya mampu memberikan kontribusi PDB nasional pada triwulan 1 2023 sebesar 8,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat Pendidikan, kemampuan adopsi teknologi, dan lemahnya permodalan.

Disamping itu, keberadaan sektor pertanian yang sangat vital ini masih terbelang investasi berisiko cukup tinggi akibat waktu panen yang lama dan rentan terhadap iklim. Pola pembiayaan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil mampu menjadi alternatif pembiayaan untuk masalah sektor pertanian tersebut karena sesuai dengan kegiatannya yang berbasis pada sektor riil. Sistem bagi hasil lebih memudahkan para petani daripada sistem bunga karena pada praktiknya sistem bagi hasil lebih mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha skala mikro, kecil, dan menengah.

Apabila dilihat dari grafik pada Gambar 2, penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian

beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah pembiayaan

pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun berdasarkan data BPS (2023) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan sektor pertanian baru mencapai angka 3,91 % dan berada pada posisi keempat setelah sektor

industri pengolahan dengan persentase 6,32 persen dari total pembiayaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan peran sektor pertanian yang besar terhadap ekonomi Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya belum mampu menjadikannya sebagai prioritas utama penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah.



Gambar 2. Pertumbuhan Pembiayaan BUS dan UUS Sektor Pertanian

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah permodalan dalam sektor pertanian. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia, menganalisis respon pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian saat terjadi guncangan (*shock*) pada faktor internal dan eksternal, dan menganalisis kontribusi pengaruh masing-masing variabel terhadap pembiayaan bank Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembiayaan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan pada Perbankan Syariah. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini menggunakan data *time series* dari Januari 2020 hingga Desember 2022.

Faktor-faktor yang diteliti akan diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari PDB, Inflasi, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Sementara untuk faktor internal terdiri dari Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Nonperforming Financing* (NPF), dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO).

TINJAUAN PUSTAKA

Pertanian

Pengertian pertanian secara umum ialah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri dan untuk mengelola lingkungannya. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Sedangkan pertanian dalam arti luas selain meliputi pertanian dalam arti sempit juga termasuk kehutanan, peternakan,



perkebunan, dan perikanan. Pada dasarnya pertanian dapat diartikan sebagai sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani dalam suatu usahatani sebagai suatu perusahaan. Dengan demikian unsur pertanian terdiri dari empat bagian yaitu proses produksi, petani, usahatani, dan usahatani sebagai perusahaan (Mosher 1966).

Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan Negara Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat dari kontribusi langsung maupun tidak langsung seperti pembentuk PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penghasil devisa dan menekan inflasi, serta pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan nasional, dan lingkungan hidup (Antara 2009). Oleh karena itu pembangunan pertanian menjadi sangat penting agar tercapai kesejahteraan masyarakat pertanian secara lebih merata. Tujuan pembangunan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, tanah dan modal.

Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani termasuk golongan miskin. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah sistem sektor pertanian yang berbeda dengan sektor lain yakni sektor ini memiliki waktu panjang untuk memperoleh hasil. Kondisi tersebut menjadi sumber kendala bagi pengembangan sektor pertanian karena modal petani yang terbatas dan belum maksimalnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Meskipun telah ada beberapa program kredit yang ditawarkan oleh pemerintah melalui program penjaminan berbunga seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan tetapi penyerapan pada sebagian program tersebut masih rendah dan belum sebanding dengan peran dan sumbangsih sektor pertanian terhadap perekonomian.

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha serta cara dan proses usahanya. Bank Umum Syariah

(BUS) adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu perbankan yang berdasarkan prinsip hukum Islam sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang syariah untuk mengeluarkan fatwa. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan, universalisme (alamiah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram. Secara garis besar kegiatan bank umum syariah dibagi menjadi 3 fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhamad (2005), Pembiayaan atau *financing* adalah sarana yang digunakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan sendiri atau pihak lain. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung suatu investasi yang diinginkan. Dalam dunia perbankan mengenal istilah tentang perkreditan dan juga pembiayaan. Kata pembiayaan digunakan dalam perbankan syariah sedangkan dalam dunia perbankan atau konvensional pembiayaan dikenal dengan istilah pengkreditan. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kegiatan penyaluran pembiayaan ini sangat rentan oleh resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas lembaga keuangan umumnya dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Kegiatan pembiayaan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup usaha lembaga keuangan, maka pemberian pembiayaan harus dilakukan



secara sistematis untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Reed (1989), Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan perbankan adalah posisi permodalan bank, resiko dan profitabilitas dari tipe pinjaman, stabilitas dana pihak ketiga, kondisi perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku, kemampuan dari bank personel serta kebutuhan kredit dalam suatu wilayah. Sejalan dengan dengan teori tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah menjadi tiga yaitu kinerja perbankan, kebijakan moneter, dan indikator makroekonomi (kondisi perekonomian).

Indikator Kinerja Perbankan

Indikator kinerja adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah organisasi mencapai tujuan yang memadai. Kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Adapun indikator kinerja perbankan yang teliti adalah:

Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada bank dengan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang umumnya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail 2010). Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber pembiayaan utama bagi perbankan. Usaha perbankan setelah menghimpun dana dari masyarakat luas kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan. DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan

pembiayaan, karena semakin besar sumber dana maka akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Kasmir 2008).

Return On Asset (ROA)

Faktor kinerja kedua adalah rasio profitabilitas, yang diproksi dengan *Return on Asset* (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan total laba. Semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin tinggi pula tingkat laba yang dicapai bank tersebut, sehingga semakin tinggi pula manajemen investasi dalam menginvestasikan laba tersebut pada berbagai aktivitas yang menguntungkan khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan terutama dari penyaluran atau pembiayaan uang. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. ROA merupakan indikator kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari berbagai aset yang dimiliki bank tersebut (Pandia 2016). Oleh karena itu, jika rasio ROA meningkat berarti aset bank tersebut digunakan secara optimal untuk memperoleh keuntungan, sehingga jika laba tinggi maka bank dapat memberikan pembiayaan yang lebih banyak, termasuk pembiayaan pada sektor pertanian.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Kasmir (2010), FDR adalah rasio yang mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang dialokasikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin baik pula kemampuan bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Rasio FDR yang tinggi mengindikasikan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak ditujukan untuk pemberian kredit/pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun, semakin likuid kondisi suatu bank mencerminkan bahwa banyak dana menganggur (*idle fund*) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh



pendapatan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik.

Oleh sebab itu, rasio FDR harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Standar nilai FDR yang baik menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat dan jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Pandia (2016), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin besar beban pendapatan bank maka semakin tidak efisien kegiatan operasionalnya sehingga pendapatannya juga semakin kecil dan berdampak pada menurunnya profitabilitas bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, standar terbaik untuk biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah berkisar 80%. Jika rasio melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut tergolong tidak efektif dalam menjalankan operasi. Dengan adanya efisiensi biaya maka akan ada penambahan jumlah dana yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian wicaksono (2020) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

Non-Performing Financing (NPF)

Non Performing financing (NPF) adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati (Mudrajat dan Suharjonoo 2002). Tingkat NPF yang tinggi

mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank akan lebih berhati-hati dan mengurangi jumlah pembiayaannya (Mahmoeddin 2010). NPF atau pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhammad 2005). Oleh karena itu, salah satu tujuan manajemen risiko pembiayaan, yaitu untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan tersebut. Maka dari itu, besarnya nilai NPF dapat mempengaruhi keputusan bank dalam menentukan pembiayaan yang akan disalurkan kepada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtias (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

Indikator Instrumen Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian. Peran tersebut terwujud dari kemampuannya mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung memengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat memengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral (Ascarya 2002). Adapun instrumen moneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau disebut juga dengan *interbank call money market* merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Pengertian pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor



7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebagian besar aset keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini dikarenakan surat berharga yang berjangka lebih panjang cenderung lebih banyak dimiliki oleh investor di pasar modal.

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peran menyalurkan dana yang terhimpun, penyaluran pembiayaan tersebut dapat ditempatkan pada Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS). Pasar uang dapat menjadi indikator yang digunakan oleh para peneliti untuk mengukur tingkat suku bunga. Pasar uang syariah juga memiliki peran penting dalam mengelola likuiditas bank syariah. Transaksi dalam PUAS biasa dilakukan oleh perbankan dalam kegiatan sehari-hari untuk menutupi kekurangan pendanaan jangka pendek. Akan tetapi, jika perbankan syariah menginvestasikan dananya pada PUAS dengan proporsi yang tinggi maka hal itu dapat mengurangi penyaluran pembiayaan pada sektor riil, khususnya sektor pertanian

Indikator Makroekonomi

Perekonomian suatu negara naik turun karena faktor-faktor baik di dalam maupun di luar kendali pemerintah dan warga negaranya. Variabel-variabel ini, yang dikenal sebagai faktor ekonomi makro, menggambarkan peristiwa yang mengubah prospek keuangan suatu negara. Adapun variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai total barang dan jasa suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan. PDB terbagi atas dua, yaitu PDB mengukur nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pasar yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas

dasar harga konstan memperhitungkan nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Menurut Mankiw (2000), Produk domestik bruto merupakan ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Peningkatan PDB merupakan signal positif bagi sektor riil sehingga ketika daya beli naik maka pelaku ekonomi berusaha untuk memperluas usaha. Perluasan usaha atau ekspansi usaha dapat dilakukan jika meminta permohonan kredit melalui lembaga keuangan, salah satu caranya dengan meminta kredit perbankan. Dengan kata lain, meningkatnya PDB akan meningkatkan penyaluran pembiayaan akibat semakin berkembangnya sektor riil.

Inflasi

Menurut Bank Indonesia (2023) inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi sendiri akan secara langsung mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal ini pasti berpengaruh pada besaran pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya (Darmawi 2012). Inflasi yang tinggi juga dapat berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat sehingga jumlah penjualan dari usaha sektor riil seperti sektor pertanian mengalami penurunan. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi dapat menimbulkan kelesuan usaha sektor riil sehingga dapat berdampak kepada menurunnya permintaan pembiayaan dari usaha sektor riil. Sehingga semakin tinggi inflasi maka akan semakin rendah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Almuna (2013) yang menemukan hasil bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis data sekunder dalam bentuk data bulanan selama tiga tahun. Data penelitian berdasarkan data dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dalam kurun waktu Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Data yang digunakan bersumber dari data

publikasi Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari Bank Indonesia (BI). Penelitian ini juga menggunakan data pelengkap lainnya dari literatur-literatur yang berkaitan, seperti jurnal, skripsi, buku, dan media internet. Sumber data dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Variabel-variabel dalam penelitian

No. Variabel	Simbol	Sumber Data	Satuan
1. <i>Financing to Deposit Ratio</i>	FDR	SPS OJK	Persen
2. <i>Non-performing Asset</i>	NPF	SPS OJK	Persen
3. <i>Return on Asset</i>	ROA	SPS OJK)	Persen
4. Biaya operasional per Pendapatan operasional	BOPO	SPS OJK)	Persen
5. Jumlah dana pihak ketiga	DPK	SPS OJK	Miliar Rupiah
6. Inflasi	INF	BI	Indeks
7. Produk Domestik Bruto	PDB	BPS	Persen
8. Pasar Uang antar Bank Syariah	PUAS	BI	Miliar Rupiah
9. Pembiayaan Pertanian (PP)	PP	SPS OJK	Miliar Rupiah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif jenis penelitian yang dipilih adalah analisis deskriptif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan analisis model *Vector Autoregressive (VAR)/Vector Error Correction Model (VECM)*. Apabila data stasioner pada level maka akan diolah dengan VAR sedangkan apabila data tidak stasioner di level maka

akan diteruskan dengan VECM. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan data menggunakan *Microsoft excel 2016* dan diolah dengan *Eviews 12*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berupa hasil perhitungan yang bersifat penggambaran hubungan variabel. Pada penelitian ini model VAR dan VECM yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \Delta LNPP_t = & \alpha + \sum_{t=1}^p \alpha_{1t} \Delta LNPP_{t-1} + \sum_{t=1}^p \alpha_{2t} \Delta LNDPK_{t-2} + \\ & \sum_{t=1}^p \alpha_{3t} \Delta NPF_{t-3} + \sum_{t=1}^p \alpha_{4t} \Delta FDR_{t-4} + \sum_{t=1}^p \alpha_{5t} \Delta ROA_{t-5} + \\ & \sum_{t=1}^p \alpha_{6t} \Delta BOPO_{t-6} + \sum_{t=1}^p \alpha_{7t} \Delta INF_{t-7} + \\ & \sum_{t=1}^p \alpha_{8t} \Delta LNPDDB_{t-8} + \sum_{t=1}^p \alpha_{9t} \Delta LNPUAS_{t-8} + \varepsilon_t \end{aligned}$$

Gambar 3. Model VAR dan VECM

Keterangan :

LNPP = Pembiayaan pertanian LNDPK = jumlah Dana Pihak Ketiga NPF = *nonperforming financing*
 FDR = *Financing to Deposit Ratio* ROA = *Return on Asset*
 BOPO = Biaya Operasional per Pendapatan Operasional INF = laju inflasi
 PDB = Produk Domestik Bruto
 PUAS = Pasar Uang Antar Bank Syariah
 α = vektor dari peubah eksogen termasuk konstanta dan trend p = ordo VECM dari VAR
 ε = vektor dari residual (galat)

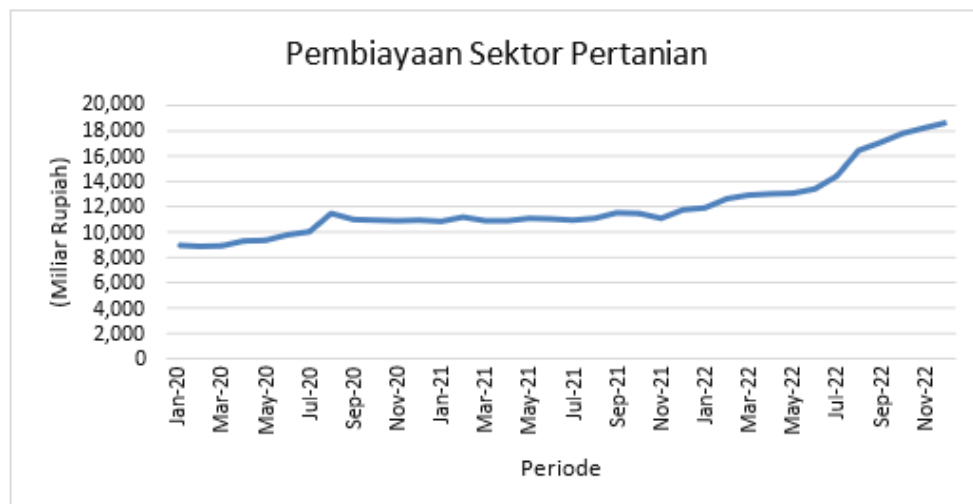


HASIL DAN PEMBAHASAN**Perkembangan Pembiayaan Sektor Pertanian BUS**

Perbankan syariah terus mengalami perkembangan pesat setiap tahunnya baik dari segi jumlah aset, jumlah kantor, jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 bahwa perbankan syariah telah memiliki 13 bank umum syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah dan 167 BPRS. Diantara ketiga jenis perbankan syariah tersebut BUS yang memiliki jumlah aset yang paling besar dan paling banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pada Gambar 4 terlihat bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki tren pertumbuhan yang positif

selama periode Pandemi Covid-19. Meski sempat mengalami penurunan, pembiayaan sektor pertanian telah mengalami peningkatan yang relatif konstan dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Pada desember 2022 terjadi peningkatan pembiayaan sektor pertanian yang sangat signifikan, yaitu naik lebih dari Rp 18,67 triliun. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan kasus Covid-19 yang menandai Indonesia memasuki era newnormal atau pemulihan semua sektor terkhusus sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19. Terlepas dari fluktuasi yang terjadi tren yang ada menunjukkan bahwa volume pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian akan cenderung meningkat tiap tahunnya.



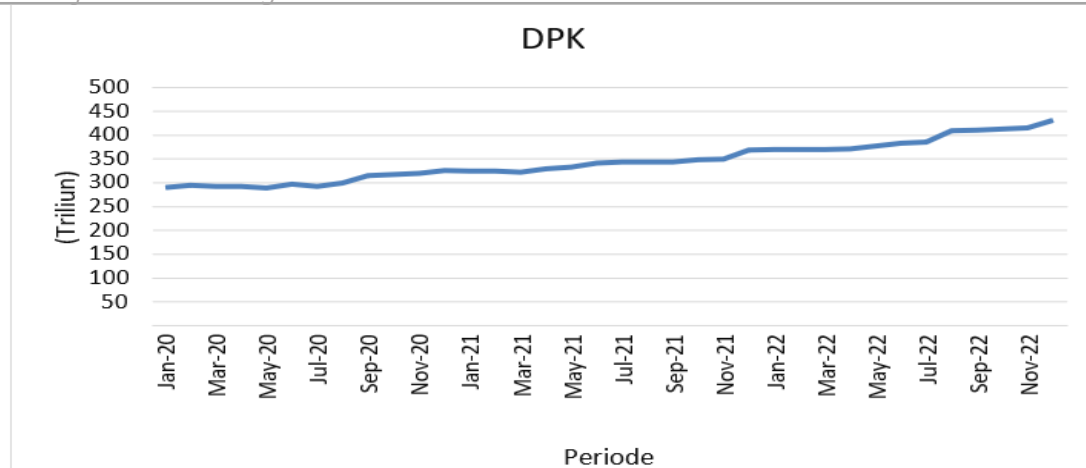
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 3. Perkembangan Pembiayaan Pertanian BUS

Perkembangan DPK BUS

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank syariah yang bersumber dari masyarakat lalu disalurkan pada berbagai jenis sektor dan penempatan dana. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 seperti yang terlihat pada Gambar 5 bahwa jumlah DPK yang tersimpan di BUS memiliki tren pertumbuhan yang positif selama Pandemi Covid-19. Jumlah DPK yang terhimpun terendah yang didapat oleh Bank Umum Syariah terjadi

pada bulan Mei 2020 yakni hanya mencapai sekitar Rp 285 miliar. Hal ini dikarenakan dampak dari gejolak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan Jumlah DPK tertinggi yang terhimpun terjadi pada bulan Desember 2022 yakni mencapai lebih dari Rp 429 miliar. Kenaikan Jumlah DPK selama pandemi Covid-19 mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah telah menunjukkan eksistensinya dalam ketahanannya dalam menghadapi krisis.



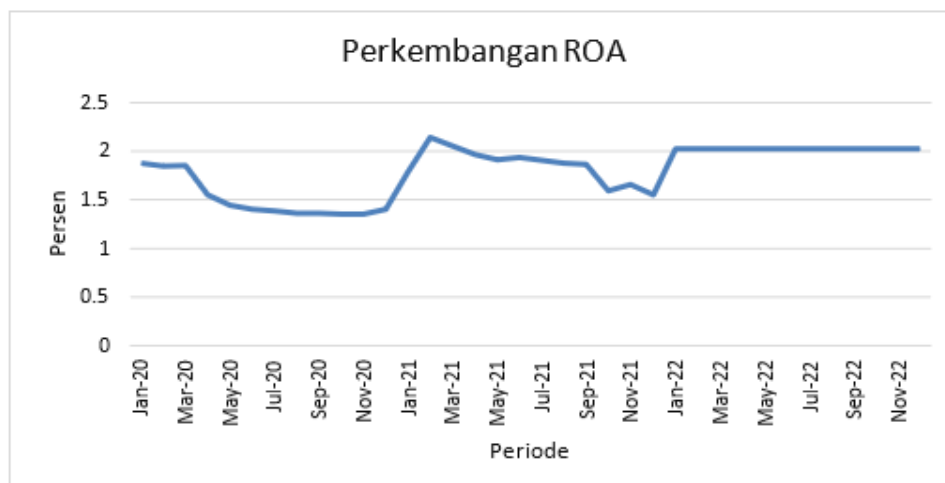
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otortas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 4. Gambar Perkembangan DPK BUS

Perkembangan ROA BUS

Return On Asset (ROA) mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Menurut Bank Indonesia standar nilai ROA yang baik adalah minimal 1,2 persen. Seperti yang dilihat pada Gambar 6 profitabilitas terendah yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah terjadi pada bulan Oktober 2020 yakni nilai ROA hanya mencapai 1,35%. Hal tersebut dikarenakan Bank Umum Syariah berhati-hati mengelola dananya selama periode ini yang

bisa dilihat dari nilai FDR yang tergolong rendah. Profitabilitas tertinggi terjadi pada bulan Februari 2021 yakni nilai ROA mencapai 2,15% setelah mengalami fluktuasi yang signifikan diakhir tahun 2020. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh Bank Umum Syariah lebih dari Rp 7 triliun, tertinggi selama periode penelitian. Fluktuasi profitabilitas yang dimiliki oleh BUS mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah belum mampu melakukan manajemen asetnya secara maksimal.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otortas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 5. Perkembangan ROA BUS

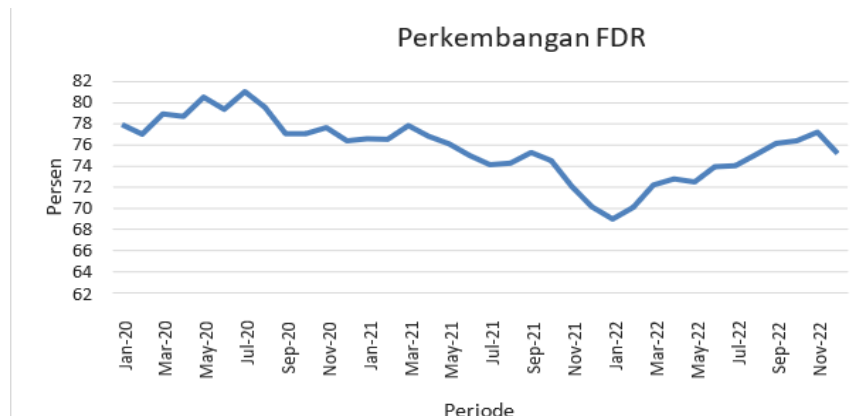
Perkembangan FDR BUS

Pergerakan FDR BUS selama Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi. Pada Gambar 7 terlihat bahwa bulan Juli 2020 merupakan titik tertinggi nilai FDR yakni mencapai 81,03%, masih di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia, yakni berkisar 80-100%. Apabila FDR melebihi 100% maka BUS dapat dikategorikan sangat buruk dalam melakukan manajemen likuiditasnya. Hal ini disebabkan oleh upaya bank syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan yang meningkat akibat Pandemi Covid-19. Nilai FDR terendah terjadi pada bulan Januari 2022

yakni mencapai 68,98%. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditasnya menghadapi gejolak ekonomi selama pandemi Covid-19. Nilai FDR yang cenderung stabil ini

mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah telah berupaya melakukan manajemen likuiditas dengan baik.



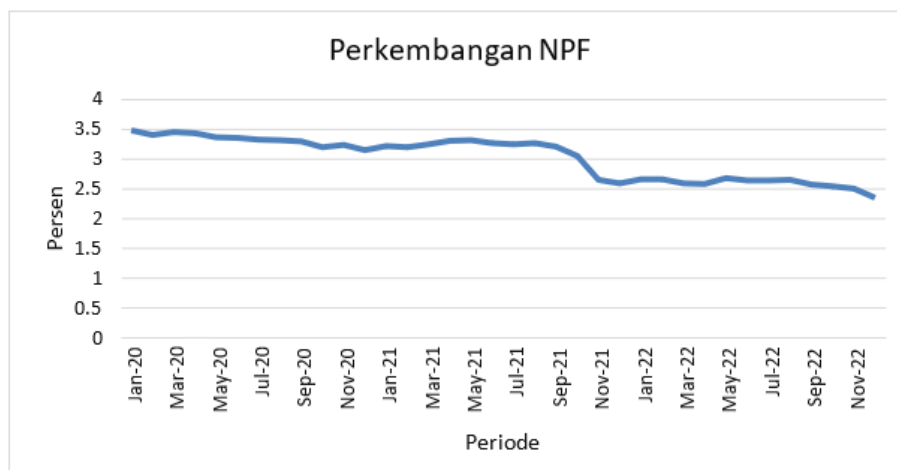
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otortas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 6. Perkembangan FDR BUS

Perkembangan NPF BUS

Pergerakan NPF BUS selama Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi namun bisa dikatakan baik. Pada Gambar 9 bulan Januari 2020 merupakan titik tertinggi nilai NPF yakni mencapai 3,46%. Hal ini disebabkan oleh awal mulanya gejolak ekonomi sebagai dampak masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia.

Namun angka ini masih tergolong sehat yaitu dibawah 5% sesuai batas aman yang diatur oleh OJK. Nilai NPF terendah terjadi pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar 2,35%. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi mulai berangsur membaik dan manajemen Bank Umum Syariah menjadi berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otortas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 7. Perkembangan NPF BUS

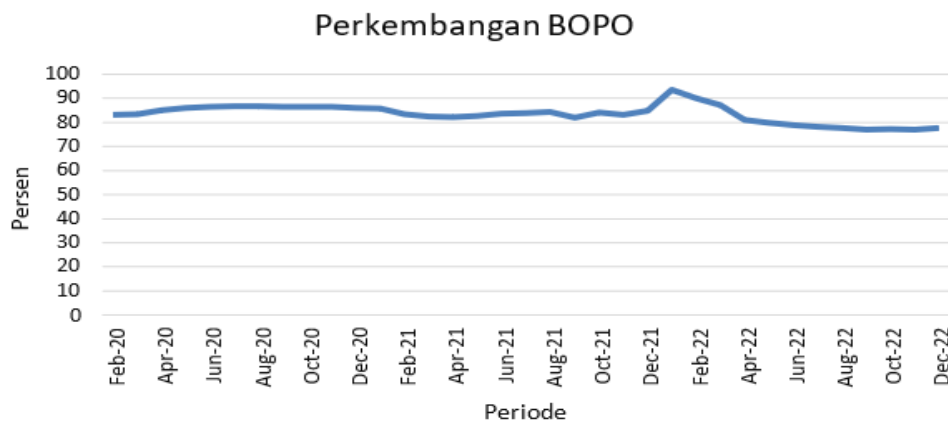
Perkembangan BOPO BUS

Pergerakan BOPO BUS selama Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi. Pada Gambar 9 terlihat bahwa bulan Januari 2022 merupakan titik tertinggi nilai BOPO, yakni mencapai 93,1%. Hal ini disebabkan

oleh penyesuaian yang dilakukan oleh bank syariah memasuki era pemulihan ekonomi. Sementara bulan September 2022 merupakan titik terendah, yakni mencapai 76,67%. Sedangkan nilai BOPO rata-rata selama Covid-19 terbilang cukup aman yaitu sekitar 83,3% yang mengindikasikan

manajemen BUS cukup efisien. Hal ini dikarenakan industri perbankan syariah

cenderung memperkuat rasio pencadangan terhadap pembiayaan.



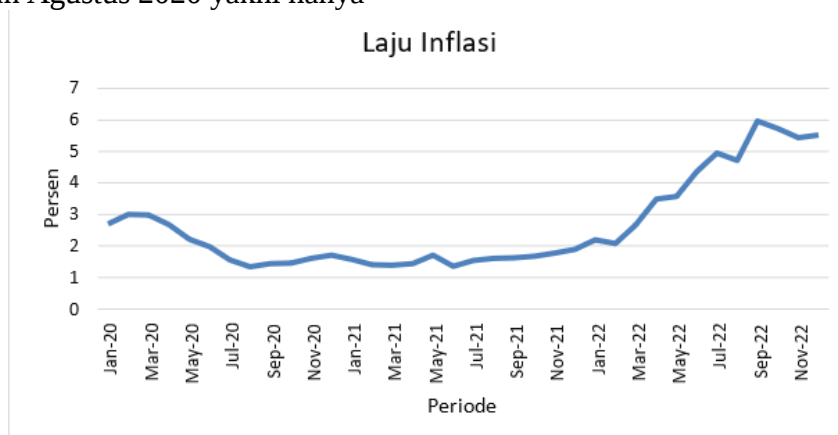
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 8. Perkembangan BOPO BUS

Perkembangan Inflasi

Pergerakan inflasi di Indonesia selama Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi namun tidak signifikan. Pada Gambar 10 terlihat bahwa bulan September 2022 merupakan titik tertinggi nilai inflasi yakni mencapai 5,95%. Sementara inflasi terendah terjadi pada bulan Agustus 2020 yakni hanya

mencapai 1,32 persen. Dengan nilai ini inflasi di Indonesia dapat dikatakan masih terkendali pada level rendah dan stabil. Tren inflasi yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah selama pandemi Covid-19 sudah sangat baik dan menunjukkan bahwa Indonesia sangat berhati-hati akan terjadinya krisis seperti pada tahun 1998.



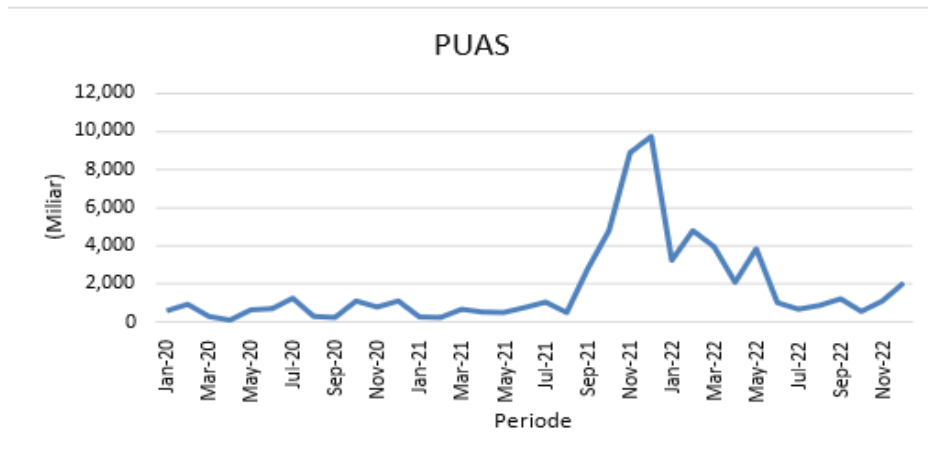
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Gambar 9. Perkembangan Laju Inflasi

Perkembangan PUAS

Pergerakan PUAS perbankan Syariah di Indonesia selama Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada Gambar 11 terlihat bahwa penempatan dana pada instrumen mulai meningkat pada kuartal keempat tahun 2021 dan bulan Desember merupakan titik tertinggi penempatan dana pada instrumen PUAS yakni mencapai Rp 9,7

triliun. Hal ini disebabkan oleh upaya bank syariah untuk menghadapi puncaknya Pandemi Covid-19 dengan tetap memperoleh keuntungan dengan risiko rendah dan menjaga likuiditasnya supaya sewaktu-waktu apabila nasabah mengambil atau melakukan penarikan dananya, bank tidak akan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kesehatan bank dan kinerjanya selalu terjaga. Sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan April



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Gambar 10. Perkembangan PUAS

Hasil Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas data merupakan syarat penting bagi analisis data *time series*. Dalam penelitian ini uji stasioneritas data menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) pada derajat yang sama (*level* atau *different*) hingga diperoleh data yang stasioner. Hal tersebut untuk melihat ada tidaknya akar

unit diantara variabel penelitian. Jika hasilnya menunjukkan nilai mutlak ADF statistik lebih besar dari nilai mutlak nilai kritis *Mac Kinnon* maka data telah stasioner ditingkat *level* dan sebaliknya. Jika data belum stasioner maka dilanjutkan pada tingkat selanjutnya yaitu *first difference* dan *second defferent*. Nilai *Mac Kinnon Critical Values* yang ditampilkan pada tabel memiliki taraf nyata 5%.

Tabel 3 Hasil Uji Stasioneritas Data

Variabel	Level			First Different		
	Nilai Statistik ADF	Nilai kritis <i>Mac Kinnon</i> (5%)	Prob.	Nilai Statistik ADF	Nilai kritis <i>Mac Kinnon</i> (5%)	Prob.
LNPP	3.079468	-1.950687	0.9991	-3.870787	-1.951000	0.0003*
LNDPK	3.816465	-1.950687	0.9999	-4.525565	-1.951000	0.0000*
ROA	-0.094067	-1.950687	0.6442	-5.512152	-1.951000	0.0000*
FDR	-0.412887	-1.950687	0.5273	-5.066540	-1.951000	0.0000*
NPF	-2.183991	-1.950687	0.0297	-4.116530	-1.951000	0.0002*
BOPO	-0.548571	-1.950687	0.4722	-5.257174	-1.951000	0.0000*
INF	1.450861	-1.950687	0.9608	-6.545290	-3.548490	0.0000*
LNPDB	-0.937544	-1.951687	0.3031	-3.585059	-1.951687	0.0008*
LNPUAS	-0.059235	-1.950687	0.6561	-6.994714	-1.951000	0.0000*

Keterangan: tanda (*) menunjukkan variabel stasioner pada taraf nyata 5 persen.

Pengujian menggunakan ADF diperoleh bahwa hanya variabel NPF yang stasioner pada tingkat *level*. Sedangkan untuk tujuh variabel lainnya stasioner di tingkat *first different* yaitu LNPP, LNDPK, ROA, FDR, BOPO, INF, LNPDB, dan LNPUAS.

Pengujian Lag Optimum

Langkah penting yang harus dilakukan dalam menggunakan model VAR/VECM adalah penentuan jumlah *lag* optimal yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel seberapa lama terhadap variabel lainnya (Firdaus 2011). Pengujian panjang *lag* optimal dalam penelitian ini menggunakan dua

kriteria yaitu *Akaike information criterion* (AIC) dan *Schwarz information criterion* (SC). Dua kriteria ini dipilih untuk menyederhanakan

kandidat *lag* yang akan dipilih, antara lain karena kriteria informasi lainnya memberikan kandidat *lag* yang sama dengan yang diberikan oleh AIC.

Tabel 4 Uji lag optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-66.90104	NA	7.03e-10	4.464767	4.868804	4.602555
1	180.3042	348.9957	4.69e-14	-5.312014	-1.271648*	-3.934133
2	319.3317	122.6713*	4.83e-15*	-8.725392*	-1.048696	-6.107419*

Keterangan: tanda (*) menunjukkan *lag* optimal

Lag optimal terlihat dari kedua perhitungan AIC dan SC. Nilai terkecil atau *lag* optimal berada pada *lag* 2 untuk perhitungan AIC, sedangkan untuk perhitungan nilai SC *lag* optimal berada pada *lag* 1. Maka dari itu model terbaik adalah model VECM *lag* 1, dan *lag* 2. Namun *Lag* 1 umumnya paling konsisten karena berdasarkan *Schwarz information criterion* menunjukkan *lag* terkecil sehingga *degree of freedom* dan efisiensi model tidak berkurang.

Hasil Uji Stabilitas VAR

Uji stabilitas VAR digunakan untuk menghitung akar-akar dari fungsi polinomial yang dilakukan untuk mendapatkan nilai dan hasil yang valid pada *Impulse Response Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Jika nilai modulus absolut kurang dari satu maka model VAR tersebut dianggap stabil.

Tabel 5 Uji stabilitas VAR

Root	Modulus
-0.627619	0.627619
0.575534	0.575534
-0.363688 - 0.315574i	0.481514
-0.363688 + 0.315574i	0.481514
0.323666 - 0.318817i	0.454317
0.323666 + 0.318817i	0.454317
0.355947	0.355947
-0.096097	0.096097
0.036768	0.036768

Pada Tabel 6 terlihat bahwa nilai semua modulus akar unit pada penelitian kurang dari satu dengan rentang nilai 0,036768 sampai 0,627619. Dengan demikian model VAR yang digunakan telah stabil sehingga hasil IRF dan FEVD dianggap valid.

Uji Kointegrasi

Fenomena data yang tidak

stasioner pada tingkat *level* akan menghasilkan hubungan kointegrasi antar variabel. Uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi Johansen (*Johansen Cointegration Test*) untuk melihat ada tidaknya hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel tersebut. Hasil dari pengujian ini akan menentukan metode analisis yang akan dipakai apakah VAR *first difference* atau VECM.

Tabel 6 Uji Kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.919930	327.5138	215.1232	0.0000



At most 1 *	0.905186	244.1937	175.1715	0.0000
At most 2 *	0.773164	166.4512	139.2753	0.0005
At most 3 *	0.715044	117.4948	107.3466	0.0091
At most 4	0.530580	76.06598	79.34145	0.0861
At most 5	0.482638	51.10951	55.24578	0.1102
At most 6	0.377347	29.36209	35.01090	0.1771
At most 7	0.232252	13.72782	18.39771	0.1992
At most 8 *	0.140755	5.006144	3.841466	0.0253

Keterangan: tanda (*) menunjukkan adanya kointegrasi pada taraf nyata lima persen.

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa ada empat persamaan yang mempunyai nilai *trace statistic* dari *critical value* dengan tingkat signifikansi 5%. Ini berarti ada dua persamaan yang terkointegrasi. Informasi mengenai terdapatnya persamaan yang terkointegrasi ini akan dilanjutkan dengan menggunakan model *Vector Error Correction Model* (VECM).

Hasil Estimasi *Vector Error Correction Model* (VECM)

Hasil estimasi VECM untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjang LNDPK, ROA, FDR, NPF, BOPO, INF, LNPDB, LNPUAS dan LNPP.

Pengujian VECM dilakukan dengan

membandingkan antara nilai t-statistik dengan nilai t-tabel. Nilai t-tabel pada penelitian ini adalah 2,051831 dengan taraf nyatanya 5%. Jika nilai t-tabel lebih kecil dari nilai t-statistik maka variabel memengaruhi memengaruhi pembiayaan pada sektor pertanian secara signifikan. Setelah dilakukan analisis didapat bahwa pada jangka pendek semua variabel belum terbukti memengaruhi pembiayaan pada sektor pertanian secara signifikan. Hasil estimasi jangka panjang VECM menunjukkan bahwa variabel NPF, Inflasi dan PUAS berpengaruh signifikan negatif terhadap penyaluran pembiayaan pertanian oleh perbankan syariah. Sedangkan Variabel DPK, FDR dan PDB berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan pertanian oleh perbankan (sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9).

Tabel 7 Hasil Uji VECM

Jangka Panjang		
Cointegrating Eq:	Koefisien	T-Statistik
LNPP(-1)	1.000000	
LNDPK(-1)	1.146310	[-10.5408]
ROA(-1)	-0.037454	[2.02399]
FDR(-1)	0.035462	[-11.5281]
NPF(-1)	-0.518829	[15.0788]
BOPO(-1)	0.003086	[1.89172]
LNPDB(-1)	1.504700	[-6.61398]
INF(-1)	-0.071140	[11.7870]
LNPUAS(-1)	-0.044102	[7.34506]
C	26.20553	

Keterangan: yang bercetak tebal menunjukkan signifikan pada taraf nyata lima persen.

Penjelasan pengaruh masing-masing variabel penelitian terhadap pembiayaan sektor pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan sektor pertanian

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian pada jangka panjang. Nilai

koefisien yang dimiliki oleh DPK adalah 1,146310 yang berarti bahwa jika dana pihak ketiga naik sebesar 1 persen maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkat sebesar 1,146310 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mughits dan Wulandari. 2016), (Anisa dan Triuspitorini. 2019), (Raihan dan Rosyadi. 2020), dan (Sumadi



dan Romdhoni. 2020) yang menyatakan bahwa hubungan DPK dengan pembiayaan pertanian adalah positif.

Hasil tersebut mendeskripsikan bahwa fluktuasi DPK terbukti mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan pertanian. DPK merupakan sumber utama bank syariah untuk melakukan pembiayaan yang berasal nasabah yang melakukan simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan.

Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Variabel *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di sektor pertanian. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank (Pandia 2016). Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, namun sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rizki Dwi Haryanti *et al.* 2022), (Adzimatinur *et al.* 2015), (Widuri dan Fajariah 2019), dan (Weningtyas 2018) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pertanian.

Jika rasio ROA meningkat mengartikan bahwa pihak bank telah mengalokasikan aktiva untuk memperoleh laba dengan optimal, sehingga dari laba yang besar itu pihak bank dapat melakukan penyaluran pembiayaan yang lebih banyak termasuk pembiayaan sektor pertanian. Meskipun setiap tahun angka ROA meningkat tetapi selama pandemi Covid-19 disetiap bulannya terdapat fluktuasi yang cukup tinggi di mana ketika jumlah pembiayaan meningkat tidak diikuti dengan naiknya angka ROA malahan terkadang angka ROA semakin turun.

Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Variabel *Financing to Debt Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian pada jangka panjang. Nilai koefisien yang dimiliki oleh FDR adalah 0,035462 yang berarti bahwa jika variabel FDR mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka jumlah pembiayaan yang disalurkan

akan meningkat sebesar 0,035462 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Adzimatinur *et al.* 2013), (Rahmawati 2019), (Fitriana 2017) dan yang menyatakan bahwa hubungan FDR dengan pembiayaan pertanian adalah positif.

Hasil tersebut disebabkan oleh nilai FDR selama periode penelitian cenderung stabil namun dibawah kondisi ideal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang telah disalurkan dengan dana yang telah dihimpun oleh bank. FDR merupakan salah satu jenis rasio likuiditas Bank. Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%. Nilai FDR dianggap aman jika nilainya mendekati 90% hingga 100%. Oleh karena itu, bank masih dapat memberikan kredit atau pembiayaan yang melebihi jumlah dana pihak ketiga yang telah dihimpun sepanjang tidak melebihi 110%.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di sektor pertanian. Nilai koefisien yang dimiliki oleh NPF adalah -0,518829 yang berarti bahwa jika nilai variabel NPF mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berkurang sebesar -0,518829 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Adzimatinur *et al.* 2015), (Anisa dan Triuspitorini 2019), yang menyatakan bahwa hubungan NPF dengan pembiayaan pertanian adalah negatif.

Keuntungan bank paling besar diperoleh dari penyaluran kredit atau pembiayaan yang disalurkan. Apabila rasio pembiayaan bermasalah (NPF) suatu bank tinggi maka secara tak langsung akan mengakibatkan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, salah kebijakan yang sering diambil oleh bank syariah ketika terjadi masalah perekonomian adalah dengan mengurangi penyaluran pembiayaan untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi pada



Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Variabel Biaya Operasional per Perpendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di sektor pertanian. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, namun sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Adzimatinur *et al.* 2015), (Sanggor, Keterose Margareta; Rotinsulu, Tri Oldy; Mandeij 2021), dan (Purnamasari 2020) yang menyatakan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pertanian.

Hal ini dapat terjadi karena nilai BOPO selama periode penelitian dapat dikatakan efisien dengan rata-rata nilainya dibawah 90%. Hal tersebut juga didukung oleh kemajuan teknologi sehingga biaya operasional bank dapat ditekan dan tidak terlalu berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Pengaruh PDB terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian. Nilai koefisien yang dimiliki oleh PDB adalah 1,504700 yang berarti bahwa jika variabel PDB mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkat sebesar 1,504700 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Selayan *et al.* 2023), (Armanto dan Yahya 2022), dan (Putra *et al.* 2021) yang menyatakan bahwa hubungan PDB dengan pembiayaan pertanian adalah positif.

Peningkatan PDB berpengaruh positif terhadap pendapatan konsumen karena dapat meningkatkan pola *saving* di perbankan. Hal tersebut sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa besarnya tabungan bukan dipengaruhi oleh tingkat bunga, namun dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat pendapatan konsumen. Peningkatan *saving* ini akan mempengaruhi jumlah pembiayaan oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan variabel PDB ini bertindak sebagai variabel eksternal

yang tidak secara langsung memengaruhi keputusan pembiayaan oleh bank syariah.

Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian pada jangka panjang. Nilai koefisien yang dimiliki oleh Inflasi adalah -0,071140 yang berarti bahwa jika nilai variabel Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berkurang sebesar -0,071140 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Akhyar 2021), (Widuri dan Fajariah 2019), dan (Anisa dan Triuspitorini 2019) yang menyatakan bahwa hubungan Inflasi dengan pembiayaan pertanian adalah negatif.

Hal ini disebabkan oleh inflasi yang tinggi menurunkan ekonomi masyarakat sehingga jumlah penjualan dari usaha sektor riil mengalami penurunan. Dampak inflasi lebih lanjut akan menyebabkan tingginya risiko *default*. Risiko ini akan meningkatkan *Non-Performing Financing* (NPF) perbankan syariah sehingga perbankan syariah akan mengurangi penyaluran dana ke sektor riil. Tingginya inflasi juga dapat membuat produk pembiayaan syariah secara umum menjadi relatif lebih mahal sehingga menurunkan permintaan kredit/pembiayaan.

Pengaruh PUAS terhadap Pembiayaan Sektor pertanian

Berdasarkan hasil estimasi data statistik diperoleh bahwa Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian pada jangka panjang. Nilai koefisien yang dimiliki oleh PUAS adalah -0,044102 yang berarti bahwa jika nilai variabel PUAS mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berkurang sebesar -0,044102 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Septindo *et al.* 2016) dan (Nirmala dan Putri 2022) yang menyatakan bahwa hubungan PUAS dengan pembiayaan



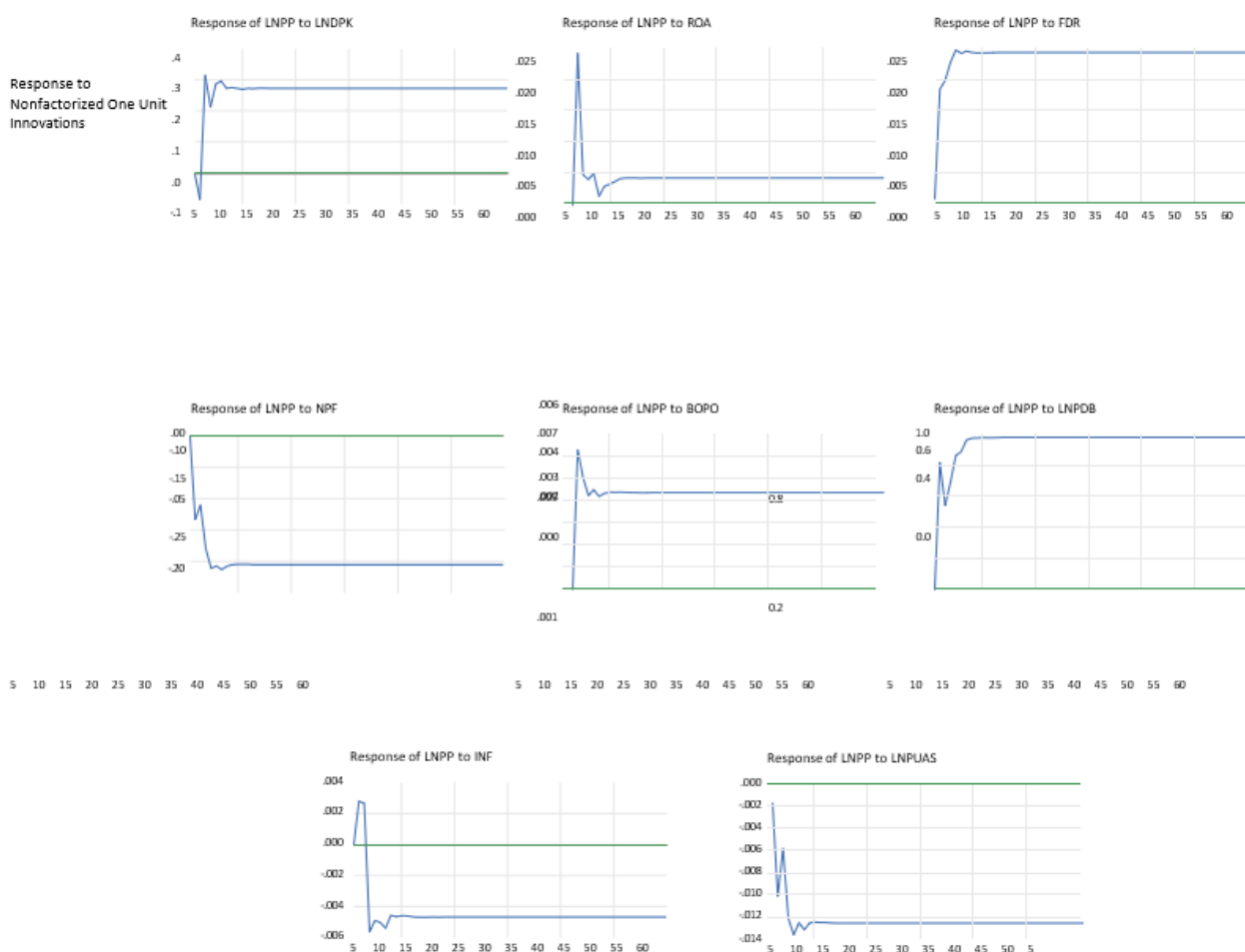
pertanian adalah negatif.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa volume PUAS bergerak searah dengan laju inflasi yang berarti saat terjadi kenaikan inflasi akibat Pandemi Covid-19 bank akan menyimpan dananya pada investasi dengan risiko kecil seperti PUAS. Walaupun secara nasional perbankan syariah terlihat likuid namun masih terdapat bank yang kekurangan likuiditas sehingga kebutuhan likuiditas jangka pendek bank syariah naik. Akan tetapi, jika perbankan syariah menempatkan dananya pada PUAS dengan proporsi yang

tinggi maka hal itu dapat mengurangi proporsi penyaluran pembiayaan pada sektor riil atau pertanian.

Function (IRF)

IRF digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap suatu *shock* tertentu dan seberapa lama pengaruhnya terhadap variabel tersebut. IRF mengukur pengaruh suatu *shock* pada suatu waktu kepada inovasi variabel tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini meneliti pengaruh *shock* selama 60 periode kedepan.



Gambar 11 Analisis *Impulse Response Function* (IRF)

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada Gambar 12, Guncangan variabel DPK direspon positif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada DPK, Pembiayaan Pertanian merespon negatif pada periode ke-2 sebesar -0,082 persen, kemudian merespon positif pada periode selanjutnya sebesar 0,315 persen dan

kembali merespon negatif pada periode ke-4. Naik kembali pada periode ke-5 sebesar 0,287 persen, kemudian terjadi fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-27 menjadi 0,273 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

2. Return On Assets (ROA)

Pada Gambar 12, Guncangan variabel ROA selalu direspon positif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada ROA, Pembiayaan Pertanian mulai merespon positif pada periode ke-2 sebesar 0,024 persen, kemudian merespon negatif atau turun pada periode berikutnya sebesar 0,004 persen. Naik kembali pada periode ke-5 sebesar 0,005 persen, kemudian terjadi fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-27 sebesar 0,004 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Pada Gambar 12, Guncangan variabel FDR selalu direspon positif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada FDR, Pembiayaan Pertanian mulai merespon positif pada bulan ke-2 sebesar 0,017 persen, kemudian merespon positif pada bulan ke-3 sebesar 0,019 persen dan bulan berikutnya hingga mencapai titik minimum pada bulan ke-5 sebesar 0,024 persen. Respon Pembiayaan Pertanian terhadap guncangan yang diterima FDR mulai stabil pada bulan ke-19 sebesar 0,023 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

4. *Non-Performing Financing (NPF)*

Pada gambar 11, Guncangan variabel NPF selalu direspon negatif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada NPF, Pembiayaan Pertanian mulai merespon negatif pada periode ke-2 sebesar -0,134 persen, kemudian merespon positif pada periode ke-3. Turun kembali pada periode ke-4 menjadi -0,181 persen, kemudian terjadi fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-24 menjadi -0,206 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

5. *Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)*

Pada Gambar 11, Guncangan variabel BOPO direspon positif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada variabel BOPO, Pembiayaan Pertanian mulai merespon positif pada periode ke-2 sebesar 0,006 persen, dan merespon negatif pada periode berikutnya sampai periode ke-4. Kemudian merespon positif pada periode ke-5 dan kembali negatif

pada periode berikutnya. Respon pembiayaan terjadi fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-15 menjadi 0,004 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

6. *Produk Domestik Bruto (PDB)*

Pada Gambar 11, Guncangan pada PDB mulai direspon positif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada variabel PDB, pembiayaan pertanian mulai merespon positif pada periode ke-2 sebesar 0,823 persen, kemudian turun pada periode ke-3 menjadi 0,545 persen. Naik kembali pada periode ke-4 menjadi 0,698 persen, kemudian terjadi fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-26 menjadi 0,986 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

7. *Inflasi*

Pada Gambar 11, Guncangan variabel inflasi selalu direspon negatif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi Guncangan pada inflasi, pembiayaan pertanian mulai merespon pada periode ke-2 sebesar 0,002, kemudian turun pada periode berikutnya hingga sampai pada periode ke-4 menjadi -0,005. Respon tersebut mengalami fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-18 menjadi -0,004 persen (selengkapnya lihat Lampiran 5).

8. *Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)*

Pada gambar 11, Guncangan variabel PUAS selalu direspon negatif oleh pembiayaan pertanian. Saat terjadi guncangan pada variabel PUAS, Pembiayaan Pertanian mulai merespon negatif pada periode ke-2 sebesar -0,008 persen, kemudian merespon positif pada periode ke-3 sebesar -0,004 persen. Turun kembali pada periode ke-4 menjadi -0,010 persen, kemudian terjadi fluktuasi pada periode selanjutnya hingga mencapai titik stabil pada periode ke-19 menjadi -0,010 persen (selengkapnya lihat Lampiran 4).

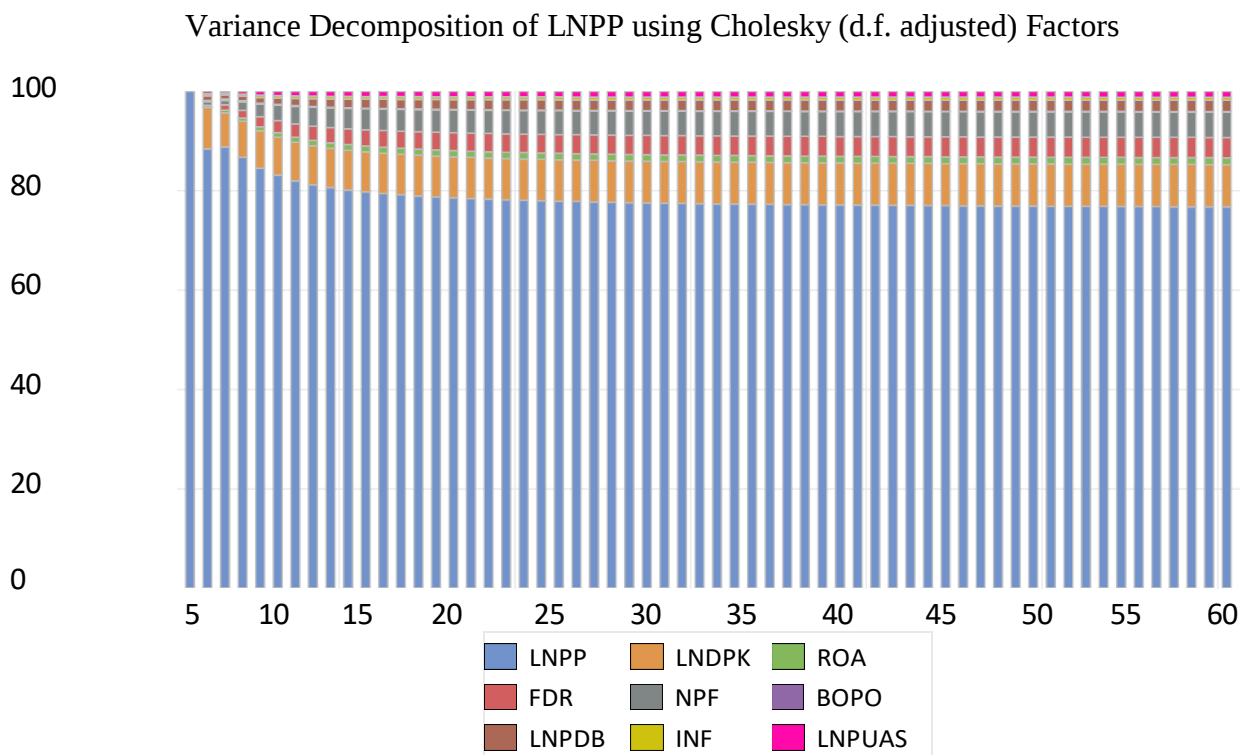
Hasil *Forecasting Error Variance Decomposition*

Analisis Forecasting Error Variance Decomposition (FEVD) digunakan untuk



mengetahui variabel yang memberi pengaruh paling besar dalam menjelaskan keragaman rasio pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah. Menurut Firdaus (2011) FEVD bermanfaat untuk menjelaskan

kontribusi dari masing-masing variabel terhadap *shock* yang ditimbulkannya terhadap variabel endogen utama yang diamati.



Gambar 13 Hasil *Forecasting Error Variance Decomposition*

Grafik *Variance Decomposition* pada Gambar 6 menjelaskan memberikan informasi seberapa besar kontribusi masing-masing variabel observasi terhadap fluktuasi Pembiayaan Pertanian. Pada periode ke-1, variabel yang memiliki pengaruh terhadap keragaman fluktuasi Pembiayaan pertanian ialah variabel Pembiayaan Pertanian itu sendiri sebesar 100 persen, dan terus berlanjut hingga akhir periode peramalan dengan presentase semakin menurun sebesar 76,75 persen. Pengaruh variabel lain mulai terlihat pada periode ke-2, dimana Pembiayaan Pertanian memberikan kontribusi sebesar 88,41 persen terhadap fluktuasinya sendiri, ditambah oleh variabel DPK memberikan proporsi sebesar 8,35 persen, ROA dengan proporsi sebesar 0,08 persen, FDR dengan proporsi sebesar 0,37 persen, NPF memberikan proporsi sebesar 0,70 persen, BOPO sebesar 0,22 persen, PDB sebesar 0,94 persen, Inflasi sebesar 0,42 persen, dan PUAS sebesar 0,47 persen.

Pada periode awal tahun kedua (13 bulan), variabel Pembiayaan Pertanian masih dominan dalam menjelaskan fluktuasi Pembiayaan Pertanian itu sendiri yaitu sebesar 80,14 persen. Variabel yang memberikan keragaman paling besar terhadap Pembiayaan Pertanian secara berurutan adalah variabel DPK dan diikuti oleh NPF, FDR, PDB, ROA, PUAS, dan inflasi. Persentase masing-masing variabel dalam menjelaskan fluktuasi Pembiayaan Pertanian secara berturut-turut yaitu sebesar 8,00 persen, 4,10 persen, 3,18 persen, 1,71 persen, 1,13 persen, 1,01 persen, 0,55 persen, dan 0,14 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada periode ke periode berikutnya justru variabel NPF dan FDR lebih besar proporsinya dari PDB dan terus memberikan kontribusi yang besar kepada Pembiayaan Pertanian hingga akhir periode. Adapun variabel DPK kontribusinya berfluktuasi namun tidak signifikan hingga akhir periode peramalan dan tetap menjadi

variabel independen terbesar kontribusinya terhadap pembiayaan sektor pertanian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan gambaran umum yang ada dapat diketahui bahwa pembiayaan pada sektor pertanian cenderung meningkat tiap tahunnya. Hasil uji analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) menunjukkan bahwa variabel ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan memengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian. Sedangkan variabel lainnya signifikan memengaruhi pembiayaan pertanian. Variabel DPK, ROA, FDR, BOPO, dan PDB direspon positif oleh pembiayaan pertanian pada guncangannya, sedangkan variabel NPF, Inflasi, dan PUAS direspon negatif. Hal ini menunjukkan bahwa guncangan kenaikan DPK, ROA, FDR, BOPO, dan PDB dapat meningkatkan pembiayaan pertanian, sedangkan guncangan kenaikan NPF, Inflasi, dan PUAS dapat menurunkan pembiayaan pertanian. Berdasarkan hasil analisis *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD), pada awal periode pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian hanya dipengaruhi oleh pembiayaan pertanian itu sendiri. Selanjutnya variabel DPK dan PDB memberikan kontribusi yang paling besar di antara variabel lainnya. Namun pada akhir periode penelitian justru variabel DPK, NPF, dan FDR lah yang memberikan kontribusi paling besar diantara variabel lainnya.

Disarankan bagi Bank Umum untuk meningkatkan proporsi pembiayaan untuk sektor pertanian seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga yang telah terhimpun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya kebijakan yang menetapkan alokasi minimal pembiayaan untuk sektor pertanian, seperti mengalokasikan pembiayaan pertanian minimal sebesar 5 persen dari total pembiayaan tiap tahunnya. Disarankan bagi lembaga pembiayaan untuk membuat suatu skema pembiayaan yang tepat bagi usaha sektor pertanian seperti sistem bayar setelah panen. Hal itu karena sektor pertanian memiliki jarak antara masa tanam dan masa panen sehingga memerlukan jangka waktu yang lama agar dapat melunasi pinjamannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap keragaman pembiayaan

pertanian namun belum berpengaruh signifikan. Nilai ROA ini penting karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi pembiayaan bank. Oleh karena itu penting bagi Bank Umum Syariah untuk meningkatkan penggunaan aset melalui pembiayaan kepada sektor yang lebih produktif sehingga mampu meningkatkan nilai ROA.

Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah saja, maka dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitiannya hingga Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bahan perbandingan dengan menambah variabel kinerja bank syariah, instrumen moneter dan indikator makroekonomi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatinur F, Hartoyo S, Wiliasih R. 2015. Faktor-faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah*. 3(2):106–121. doi:10.29244/jam.3.2.106-121.
- Akhyar, 2021. Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian Pada Bank Umum Syariah Di Provinsi Aceh. <http://repositori.utu.ac.id/id/eprint/126/1/BAB I-V.pdf>.
- Almuna, Neil 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian pada Bank BPRS di Indonesia. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Amalia, N.F. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah pada Sektor Pertanian di Indonesia tahun 2009-2015. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anisa LS, Triuspitorini FA. 2019. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *J Maps (Manajemen Perbank Syariah)*. 3(1):52–64. doi:10.32627/maps.v3i1.141.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank



- Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Apriyadana, R., & Kusumaningtias, R. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dengan Metode Economic Value Added. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2.
- Armanto A, Yahya A. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Syariah Sektor Agrikultur Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2020. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*. 1(1):22-42.
- Asaad. 2011. Peningkatan peranan perbankan syariah untuk pembiayaan usaha pertanian. *Jurnal Miqot*. 35 (1):114-127. Medan (ID): UIN Sumatra Utara.
- Ascarya dan Yumanita, D. 2005. Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta (ID): Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Ascarya. 2009. Aplikasi Vector Autoregression dan Vector Error Correction Model Menggunakan EVIEWS 4.1. Center of Education and Central Bank Study. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Forum Penelitian Agroekonomi*. 23(2) 145-146. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Badan Pusat Statistika. 2023. Distribusi PDB atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020-2022. [Internet]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id>.
- Bank Indonesia. 2023. Data Inflasi Indonesia (Persen) 2020-2023. [Internet]. Tersedia dari: <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>.
- Bank Indonesia. 2023. Posisi Operasi Moneter dan Transaksi Pasar Uang. [Internet]. Tersedia dari: <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi>.
- Beik IS, Aprianti WN. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Perikanan di Indonesia [Analysis of Factors Affecting Islamic Banking Financing for the Fisheries Sector in Indonesia]. *J Agro Ekon*. 31(1):19-36.
- Cahyani YT. 2018. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016). *IQTISHADIA J Ekon Perbank Syariah*. 5(1):58-83. doi:10.19105/iqtishadia.v5i1.1695.
- Dahlan, R. 2014. Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikan Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. [Jurnal]. *Etikonomi* 13 (2). Jakarta (ID): UIN Syarif Hidayatullah.
- Darmawi, H. (2011). Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fatimah, siti. 2015. Pengaruh Kurs, Inflasi, DPK, SWBI, Dan Pendapatan Bank Terhadap Tingkat Pengguguran Dana Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Non-Devisa Syariah Periode 2011-2013). Universitas Dian Nuswantoro.
- Firdaus M. 2020. Aplikasi Ekonometrika dengan E-Views, Stata dan R. Elviana, editor. Bogor: IPB Press.
- Fitriana R. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37255>.
- Giannini, 2013. Faktor yang memengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.
- Gujarati D. 2007. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta (ID): Erlangga.
- Hawa, R. D. 2018. Pengaruh DPK, Imbal Hasil



- SBIS, PUAS, dan tingkat Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan*. 5 (12): 1003-1019. Surabaya (ID): Universitas Airlangga.
- Jaya, Y. P., Rindayati, W., & Ali, K. M. (2015). Analisis faktor-faktor penentu pembiayaan perbankan syariah pada sektor pengangkutan dan komunikasi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(1), 62–75.
- Juanda, B., dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. Bogor (ID): IPB Press. Karim.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumawati, N. N. (2013). Analisis pembiayaan sektor konstruksi pada perbankan syariah di Indonesia Islamic banking financing analysis on construction sector in Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 191–203.
- Mahmoeddin, A. (2010). *Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mughits M, Wulandari R. 2016. *Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor*.
- Mankiw NG. 2007. *Makroekonomi*. Ed ke-6 Liza F, Nurmawan I, penerjemah; Hardini W, Barnadi D, Saat S, editor. Jakarta: Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: *Macroeconomics*. Ed ke-6.
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1823583.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Nirmala T, Putri RA. 2022. *Penyaluran Dana Ke Sektor Properti Di Indonesia Periode 2014-2020*. 3(1):101–122.
- Nisa, K. 2017. *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian pada Perbankan Syariah di Indonesia*: Institut Pertanian Bogor.
- Nugraha, F. N. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Jasa Dunia Usaha di Indonesia*: Institut Pertanian Bogor.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Data Statistik Perbankan Indonesia Des 2022*. [Internet]. Tersedia Pada: <https://www.ojk.go.id/id>.
- Pandia, Korinti. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum di Indonesia*. Universitas Jember.
- Pertanian di Indonesia [Contribution of Islamic Bank Financing to the Agricultural Sector in Indonesia]. *Al-Muzara'ah*. 4(1):61–75.
- Perwataatmadja, K., Antonio, M. S. 1992. *Apa dan bagaimana bank islam*. Yogyakarta (ID): Dana Bhakti Wakaf.
- Purnamasari K. 2020. *Pengaruh Ukuran Bank, Efisiensi, Dana Pihak Ketiga, Tipe Kepemilikan, dan Likuiditas terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia*. *Target J Manaj Bisnis*. 2(2):227–236. doi:10.30812/target.v2i2.989.
- Putra HS, Putri Y, Vidriza U. 2021. *Determinan Kredit Bank Umum Untuk Sektor Pertanian: Analisis Dari Sisi Permintaan*. *Agricore J Agribisnis dan Sos Ekon Pertan Unpad*. 6(1):35–48. doi:10.24198/agricore.v6i1.33312.
- Rahmawati EE. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia*. Nber Work Pap.
- Raihan MA, Rosyadi I. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian Di Indonesia Tahun 2015-2017*. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/86225%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/86225/1/NASKAH_PUBLIKASI_ku_baru.pdf.
- Rendiana G. 2015. *Analisis Pengaruh Efisiensi (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Assets (ROA) (Studi Kasus Pada Perbankan*



- Syariah Yang Terdaftar di OJK pada Tahun 2010-2014). *Pros Manaj Unisba*.(2015):278–284.
- Ridwan, I. R. 2009. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Konversi Lahan Pertanian. *Jurnal Geografi GEA*. 9 (2): 47-59. Bandung (ID): Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rizki Dwi Haryanti, Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *AKUA J Akunt dan Keuang*. 1(3):370–382.
- Saekhu. 2015. Pengaruh Inflasi terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. *Jurnal Economica*. 6 (1): 103-128. Semarang (ID): UIN Walisongo.
- Sanggor, Keterose Margareta; Rotinsulu, Tri Oldy; Mandeij D. 2021. Analisis Determinan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah pada Bank Umum di Indonesia. *J Berk Ilm Efisiensi*. 21(01):1–23.
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan syariah sektor pertanian. *Jurnal Agrica*, 10(2), 112.
- Selayan AN, Yafiz M, Daulay AN. 2023. Pengaruh Inflasi, Kurs, dan PDB terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. *J Intelekt Keislaman, Sos dan Sains*. 12(2).
- Septindo D, Novianti T, Lubis D. 2016. Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Pertanian di Indonesia. *Al-Muzara'ah*. 4(1):1–18. doi:10.29244/jam.4.1.1-18.
- Sudarsono, Heri, 2004, Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sumadi S, Romdhoni AH. 2020. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018). *J Ilm Ekon Islam*. 6(3):598. doi:10.29040/jiei.v6i3.1430.
- Thoha, M., Saptia, Y. 2009. Efektivitas Model Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian. Jakarta (ID): LIPI Press, anggota Ikapi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Weningtyas F. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.
- Wicaksono SA, Fitriyani Y. 2020. Analysis of factor affecting Islamic commercial bank financing for the agricultural sector in Indonesia. *Asian J Islam Manag*. 2(2):123–137. doi:10.20885/ajim.vol2.iss2.art5.
- Widiyanti. 2014. Analisi Pengaruh CAR, ROA, NPL, BoPo, dan DPK terhadap Penyaluran Kredit UMKM di Indonesia. *Jurnal. Universitas Riau*. Pekanbaru.
- Widuri T, Fajariah N. 2019. Pengaruh Inflasi dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap



Pembiayaan pada Bank
Umum Syariah (Tahun 2015-
2018). JMK (Jurnal Manaj

dan Kewirausahaan).
4(2):136.
doi:10.32503/jmk.v4i2.48.

